

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Ahmad Ramdhan Siregar, *Globalisasi & Persaingan Usaha*, Bandung, Humaniora, 2011.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, cetakan pertama. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Fami lubis, dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007.
- Asril Sitompul, *Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999)*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, 2016.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014.
- Edy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, AMELIA, 2003
- E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, buku Kompas, 2007.

- E. Fernando Manullang, *Legisme, legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Anti Monopoli*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, USA, Translated by Andres Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, 2009.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Jazim Hamidi dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013.
- Joachim, Carl dan Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang, Bayumedia, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Made Kembar Sri Budhi, *Teori Ekonomi Mikro*, Denpasar, Udayana University Press, 2009.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Moh, Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia, Cet 1*, Jakarta, Pusat Studi HTN, FH UI, 1976.

- MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Cetakan kesembilan belas Juli 2020, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Muchti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 2 2012.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Muhammad Teguh Pangestu, *Badan Usaha Milik Negara dan Status Hukum Kekayaan Negara*, Makassar, Social Political Genius (SIGN), 2020.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Edisi Revisi, Cet. III, Kencana, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Puspaningrum Galuh, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2013.
- Putu Samawati, *Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Tunggal Mandiri, 2018.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2007.
- Romli Atmasasmita dkk, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Sudiarto, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2021.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana, 2012.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses Pemeriksaan Perkara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Jurnal:

Allum Petronella Simbolon, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol 20, No. 3, Oktober 2008

Elli Ruslina, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konsitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.

Eka An Aqimuddin, Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Hukum Internasional: Menyigi Rasionalitas Negara, *Law Review*, Vol. XVIII, No. 2 (November, 2018)

Hikmahanto Juwana, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1, 1999.

Irna Nurhayati, Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik, *Jurnal Hukum Bisnis*, No.2, vol.30, 2011.

Muhammad Rustamaji, Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A. Posner, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1 (April, 2013).

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* , Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Udin Silalahi, Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Universitas Pelita Harapan, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 9, No. 1, 2018.

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XII/2015, diputus tanggal 14 November 2016

Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 001-021-011/PUU.I/2003, diputus tanggal 15 Desember 2004.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2018 tertanggal 29 Juli 2019

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 905/ Pdt.sus-KPPU/2019/PN tertanggal 18 November 2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344/Pdt.Sus-KPPU/2020 tertanggal 3 November 2020

Undang-Undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656)

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 253/KPPU/Kep/VII/2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan ketentuan pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.

Keputusan Komisi No. 89 /2009 Tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik
Negara

Disertasi :

Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu HUKUM Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Website:

Maleha Soemarsono, 2007, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni, hal.305, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1480/1395>. diakses pada 28 September 2020 pukul 13.00 WIB.

[Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999.pdf \(uma.ac.id\)](#), Zainir Munawir, SH,M.Hum., Problematika ketidakjelasan substansi dari UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai faktor perlunya direvisi (Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Prolegnas 2015-2019 Dan Prolegnas RUU Prioritas 2015), *Jurnal Universitas Medan Area*, diakses tanggal 25 Agustus 2021 pukul 9.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/>, [BUMN Tidak Boleh Berlindung di Balik Hak Monopoli - Berita Hukumonline](#), hukum online, Jakarta, 2009, diakses tanggal 18 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB.

<https://www.tribunnews.com/>, [BUMN Disidang Kasus Monopoli karena Kelola Sumber Daya Alam, Ini Kata DPR - Tribunnews.com](#), Tribun News, Jakarta, 2017, diakses tanggal 18 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/133962/kppu-bumn-tak-boleh-lakukan-praktik-monopoli/> , Kunto Wibisino, [KPPU: BUMN Tak Boleh Lakukan Praktik Monopoli - ANTARA News](#) , Jakarta, 2009, diakses tanggal 21 Agustus 2021 pukul 9.30 WIB.

<https://analisis.kontan.co.id/news/upaya-bumn-menjejahterakan-rakyat/>), Ali mutasowin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, “Upaya BUMN Menyejahterakan Rakyat” harian kontan.co.id, diakses tanggal 25 Agustus 2021 pukul 9.00 WIB.

<https://Erick akan Lebur 35 BUMN Jadi Satu | Republika Online>, Friska Yolanda/ Intan Pratiwi, harian republika.co.id , diakses tanggal 25 Agustus 2021 pukul 9.00 WIB.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/download/163/10>, Sukarna Wiranta, Privatisasi Bumn Dan Perannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional: Kasus Pt. Garuda, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No.1, Juni 2011, diakses tanggal 21 September 2021, pukul 11.00WIB

[https:// Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara \(BUMN\) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean \(MEA\) | Ikhwansyah | Jurnal Media Hukum \(umy.ac.id\)](https://Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Ikhwansyah | Jurnal Media Hukum (umy.ac.id)), Isis Ikhwansyah, An-an Chandrawulan dan Prita Amalia, Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Jurnal Media Hukum*. Vol. 25 No. 2/ Desember 2018. diakses tanggal 21 September 2021, pukul 11.00 WIB.

[https:// KARYA ILMIAH TESIS.pdf \(undip.ac.id\)](https://KARYA ILMIAH TESIS.pdf (undip.ac.id)), Supono, *Implementasi Asas Equality Before The Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan hubungan Industrial*, diakses tanggal 13 Agustus 2021, pukul 13.003 WIB

[https:// KBBI.go.id// Arti Kata "perkara" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](https://KBBI.go.id//Arti Kata) diakses tanggal 1 Maret 2021 pukul 8.00

[https:// Jurnal Forum Ilmiah 764-1609-1-SM.pdf](https://Jurnal Forum Ilmiah 764-1609-1-SM.pdf), Taufik H. Simatupang, Pemihakan dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Dokrinal dan Non Dokrinal, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Jurnal Forum Ilmiah* , Volume.8 Nomor 1, Januari 2011 Jakarta. Diakses tanggal 2 Maret 2021